

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Agusmidah. 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ashshofa, Burhan, 2001, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Azwar, Sarifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Djumialdji, 2010, *Perjanjian Kerja Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Giddens, Anthony. 1982, *Class Devision, Class Conflict, and Citizenship Rights, in his Profile and Critiques in Social Theory*. Macmillan, London.
- Guo, 1996, *Border-Regional Economic, Heidelberg, Physica-Verl*, Germany.
- Hart, Keith. 1973, *Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Istianto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum CV*, Ganda, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 2002, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Balai Pustaka, Jakarta.
- Madu, Lidiro, 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosyada, Dede 2005, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Kencana, Jakarta.
- Safaria, Anne Friday, Selly Riawanti dan Dadi Suhandal. 2003, *Hubungan Perburuhan di Sektor Informal Permasalahan dan Prospek*, Akatiga, Jakarta.
- Sihombing, Uli Parulian, Asfinawati, 2011, *Pekerja Sektor Informal: Berjuang Untuk Hidup*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soepomo, Iman, 1999, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.

Tatjhan, Surya, Yasmine Soraya dan Jamaluddin, 2007, *Advokasi Pengupahan Daerah*, Turc, Jakarta.

## 2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 ).

Undang-Undang No. 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara ( Lmberan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177 ).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3843).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 47) .

Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan Tujuh PLBN Terpadu dan Sarana-prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

## 3. Artikel Jurnal

Indrawati, Netty, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal ( Studi Kasus di Kota Kediri)*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol 12 No 2, Maret 2012.

Charda, Ujang, “*Telaah Kritis Terhadap Inkonsistensi Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*”, Jurnal wawasan Hukum, Vol 33, No. 2, 2015.

Hidayah, Nur., *Eksistensi Buruh Gendong Sebagai Pilihan Pekerjaan Di Sektor Informal*, Dimensia Volume 3, No. 1, Journal UNY, Yogyakarta, 2009.

#### 4. Internet

Ali, 2016 , “ Uti Possidetis Juris, Prinsip yang Digunakan Indonesia untuk “Menjaga” Papua”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/uti-possidetis-juris--prinsip-yang-digunakan-indonesia-untuk-menjaga-papua/> pada tanggal 2 April 2019.

Badan Informasi Geospasial “Peta Indonesia” diakses dari <http://www.big.go.id/> pada tanggal 1 April 2019.

Badan Pusat Statistik, “Persentase Pekerja Informal (2017)” diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html> pada tanggal 15 Oktober 2018.

Bank Indonesia, “ Fungsi bank Indonesia “, diakses dari <https://www.bi.go.id>, pada tanggal 12 Maret 2019.

BAPPENAS, “Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara di Indonesia”, diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah\\_20081123002641\\_15.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3713/5648/9773/16peta-kemampuan-keuangan-provinsi-dalam-era-otonomi-daerah-tinjauan-atas-kinerja-pad-dan-upaya-yang-dilakukan-daerah_20081123002641_15.pdf) pada tanggal 16 Maret 2019.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, “Informasi Umum Tentang Pos Lintas Batas Negara (PLBN)”, diakses dari <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/04/PLBN-BNPP.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2019.

Serikat pekerja Nasional, 2017 “Pengertian dan dasar hukum pengawasan ketenagakerjaan “, diakses dari <https://spn.or.id/pengertian-dan-dasar-hukum-pengawas-ketenagakerjaan/> pada tanggal 23 Maret 2019.

Tempo, “ Bi Izinkan Pedagang Transaksi Valuta Asing di Perbatasan RI-PNG” diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/874878/bi-izinkan-pedagang-transaksi-valuta-asing-di-perbatasan-ri-png> , pada tanggal 22 Maret 2019.

#### 5. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Amalia,Safiera, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal Di Lesehan Malioboro Kota Yogyakarta*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## 6. Dokumen

*Papua New Guinea National Court of Justice CR 1836 of 2005 The State -Bruno Tanfa Chilong.* Peta Adat Lhouching yang dibuat oleh masyarakat Chilong.

*Data Resume Penilaian Properti Kemeterian PUPR-* Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Strategis Tahun 2017.

## 7. Referensi lain

Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI , 2015. *Pedoman Tanya Jawab Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.* Jakarta.

firnanddy , 2008, *Studi Profil Pekerja Di Sektor Informal dan Arah Kebijakan Ke Depan,* Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi, Jakarta.

Ikhwanuddin, 2016, *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan,* Badan Perencana Pembangunan Nasional, Jakarta